



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MAHYUDA
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 6349

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.355.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/48 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/48 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/48 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 3.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SMASH SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 29.300.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 237.000.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 2.624.300.000

**III. HUTANG**

Rp. 50.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 2.574.300.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MAHYUDA  
NIK : 1376012805690001  
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI  
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA BANGKO  
Jabatan : KETUA  
Jenis Laporan : Periodik - 2020  
Tanggal Kirim : 14 Januari 2021

*Catatan:*

*Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.*



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

-----  
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.